

## **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)**

Citra Asri Yulianti<sup>1</sup>, Nurhayani<sup>2</sup>, Ilmu Hukum  
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat  
[citraasri9799@gmail.com](mailto:citraasri9799@gmail.com); [nurhayani@esaunggul.ac.id](mailto:nurhayani@esaunggul.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengambilalihan saham sebagai suatu perbuatan aktivitas hukum yang dilaksanakan badan hukum atau perseorangan melalui perjanjian pengambilalihan saham. Bentuk perjanjian, pengambilalihan saham berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tak menunaikan kewajiban. Permasalahan yang penulis analisis adalah apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada tetapan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan bagaimana upaya hukum yang dapat diambil Penggugat terhadap gugatan ganti kerugian yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan teori keadilan dari Gustav Radbruch sebagai hak dan upaya untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat berwujud perlindungan bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara materil. Kesimpulan dari penelitian ini yakni akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst adalah pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga perjanjian antara penggugat dan tergugat dianggap tidak pernah terjadi. Penggugat bisa menempuh upaya hukum terhadap kerugian ganti rugi yang tidak dikabulkan majelis hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum banding, ialah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tinggi atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Perjanjian*

## **ABSTRACT**

***Default in the Share Acquisition Agreement (Case Study of Decision Number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst)***

***By: Citra Asri Yulianti, Law Science***

*Acquisition of shares is a legal act carried out by a legal entity or individual through a share acquisition agreement. As a form of agreement, an acquisition of shares has the potential to result in default when one of the parties does not fulfill its obligations. The problem that the writer will analyze is what is the legal consequence of the cancellation of the share takeover agreement in the decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst and how the legal remedies that can be taken by the Plaintiff against the claim for compensation that were not granted by the Panel of Judges. The method used in this research is normative legal research method. The author uses Gustav Radbruch's theory of justice as a right and an effort to get justice. Justice in this case can take the form of protection for the Plaintiff as a party who has been materially harmed. The conclusion of this study is that the legal consequences of the cancellation of the share takeover agreement in decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst are the injured party requesting the cancellation of the agreement based on Article 1267 of the Civil Code so that the agreement between the plaintiff and the defendant is deemed to have never occurred. . The legal remedy that can be taken by the Plaintiff against compensation that was not granted by the panel of judges is by filing legal remedies, the legal remedy here is an appeal that is submitted to the high court over dissatisfaction with the district court's decision.*

***Keywords: Default, Agreement***